

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut Al-Ghazali, relasi ulama dengan *umara'* sangat kuat. Sebab, para penguasa pada masa kehidupannya sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Para ulama saling bersaing dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Akan tetapi, tujuan mereka tidak hanya untuk pengembangan ilmu, melainkan untuk memperoleh simpati penguasa, yang selalu memantau kemajuan mereka untuk direkrut guna menduduki posisi jabatan intelektual yang menguntungkan. Lebih jauh lagi, konflik sosial antar umat Islam di era Al-Ghazali berawal dari perbedaan kognisi doktrin agama, bahkan berawal dari pengaruh berbagai budaya non-Islam yang ada, kemudian diwujudkan dalam berbagai bentuk. Atas berbagai peristiwa yang terjadi, Al-Ghazali kemudian menulis buku yang berjudul *Ihyā' 'ulūm al-dīn*. Secara keseluruhan, *Ihyā' 'ulūm al-dīn* menjelaskan ketika disimpulkan bahwa seorang ulama yang memiliki pengetahuan yang tak terhitung jumlahnya dan menunjukkan jalan yang benar bagi siapa saja yang membutuhkan, ia menjelaskan tentang peringatan tersebut kepada siapapun yang membutuhkan jalan yang benar.

Al-Ghazali mengatakan bahwa hubungan ulama dengan *umara'* diibaratkan ulama sebagai guru dan *umara'* sebagai murid. Dengan demikian jika ulama menasihati *umara'*, lalu mematuhi nasihat tersebut, maka dapat dikatakan telah terwujud cinta negara dari dua belah pihak. Kepatuhan *umara'* pada ulama sama seperti kepatuhan murid pada gurunya. Dia harus berdiri teguh pada prinsip dan tujuan hukum Islam murni serta hikmah yang terkandung di dalamnya. Ulama harus mengetahui posisi perselisihan atau kesepakatan antara semua ulama. Karena para penguasa harus diawasi dan selalu memberikan nasehat ketika mereka menyimpang atau melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya mengurus negara, dan para pemimpin (*umara'*) harus siap membantu para ulama menghadapi masalah mereka. Bantuan ini diberikan dalam bentuk dorongan materi dan memberikan apa yang dibutuhkan ulama dalam urusan mereka. Bisa jadi hubungan ulama dan *umara'* tidak lagi terjalin komunikasi yang baik, dan tidak ada lagi

keharmonisan, karena tujuan dan fungsi ulama dan *umara'* lambat laun akan hilang dengan kepentingannya masing-masing. *Umara'* untuk kepentingan negara atau urusan politik, sedangkan ulama membidangi urusan agama dan berdakwah sehingga tidak jarang terjadi perbedaan dengan *umara'*.

Perspektif Al-Ghazali tentang hubungan ulama dan *umara'* memiliki tujuan utama dalam sistem pemerintahan pada masanya. Para penguasa tidak pernah lepas terhadap kritik dan saran dari para ulama. Meskipun pada umumnya, mereka menjalankan pemerintahan menurut hukum Islam, menegakkan hukum, memperhatikan urusan pokok umat Islam, dan melakukan jihad. Oleh sebab itu, para penguasa harus diawasi dan selalu diberikan nasehat ketika mereka menyimpang atau melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya mengurus negara.

2. Pada konteks politik Islam Indonesia, hubungan ulama dengan *umara'* dapat dilihat pada lima era pemerintahan yaitu, pada era tansisi, orde lama, orde baru, refomasi dan kontemporer. Pada masa Transisi, masa pra kemerdekaan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), perumusan UUD, Pancasila dan Piagam Jakarta. Tampak terlihat hubungan ulama dan *umara'* dalam perumusan kemerdekaan. Dibentuknya BPUPKI adalah langkah kongkrit petama bagi pelaksanaan janji perdana menteri Kosio tentang "kemerdekaan Indonesia kelak di kemudian hari". Kemudian dibentuklah panitia kecil dengan melakukan pertemuan dengan anggota BPUPKI yang kemudian melahirkan panitia sembilan. Panitia ini merumuskan tujuan pembentukan Negara Indonesia merdeka dalam rumusan yang disebut Piagam Jakarta. Pada 10 Juli 1945 dibahas rencana UUD yang diketuai oleh Ir. Soekarno lalu pada tanggal 7 Agustus 1945, didirikanlah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai ganti BPUPKI yang diketuai oleh Ir. Soekarno dan wakilnya Moh. Hatta dengan beranggotakan 21 orang.

Pada masa Orde Lama (1945-1966), yang dipimpin oleh Presiden Ir. Soekarno, pada era ini pemikiran bangsa Indonesia terbagi menjadi nasional sekuler dan nasional Islam, dalam hal ini umat Islam memainkan peran yang sangat besar guna menghancurkan kekuatan komunis di

Indonesia. setelah mengeluarkan dekrit, Soekarno yang sudah terobsesi menjadi penguasa mutlak di Indonesia, memaksa pembubaran Partai Masyumi pada tanggal 17 Agustus 1960. Penerapan Demokrasi Terpimpin oleh Soekarno terbukti menimbulkan reaksi ulama dari partai Islam. Hal ini menyebabkan Periode Kristalisasi dan Periode Kolaborasi. Periode Kristalisasi ditandai dengan, pro dan kontra. Sedangkan masa Kolaborasi yang ditandai dengan kerjasama ulama dengan *umara'*, termasuk dengan komunis, itulah salah satu pilar pendukungnya. Ulama dipandang sebagai salah satu unsur Nasakom bersama NU sebagai wakil utama, partai-partai Islam lainnya yang menghadapi berbagai masalah politik meniru gaya NU yang merupakan kekuatan Islam terbesar saat itu.

Pada masa Orde Baru (1966-1998), dipimpin oleh Presiden Soeharto yang berlangsung selama 32 tahun secara terus menerus. Pada masa ini pemikiran politik Islam mengalami pasang surut. Pada periode 1982-1985 terjadi perubahan yang fundamental mengenai hubungan yang baik antara ulama dengan *umara'* yang mulai terwujud meski belum sampai pada tahap yang ideal. Sekalipun hubungan baik ini dinisbatkan pada keberhasilan merumuskan orientasi baru politik Islam, namun terdapat konteks sosial yang ikut mendukungnya, yaitu perbaikan ekonomi, pendidikan, mobilitas sosial yang tinggi dari umat yang saling mendukung, kemudian adanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan hasil dari rangkaian keadaan sosial politik karena sifatnya yang dinamis. Fatwa yang dikeluarkan MUI seringkali merupakan respon terhadap perkembangan baru yang terjadi. Peran utama MUI sejak saat itu periode berdirinya pada tahun 1975-1990 adalah untuk mendukung dan beberapa kasus melegitimasi kebijakan dan program pemerintah Dalam konteks negara, fatwa MUI hampir selalu didukung *umara'*. MUI menggunakan fatwa sebagai alat diskursif untuk penegasan legitimasi aslinya dalam menentukan wacana keagamaan publik. Dengan fatwa dan kewenangannya, MUI menumbuhkan risalah baru, yaitu mainstream agama, sekaligus memperkuat klaim ulama atas kekuasaan. MUI berhasil membangun dan menguasai wacana keberagaman masyarakat, khususnya dalam fatwa tentang pemahaman meyakini.

Masa Reformasi, telah mengalami 3 kali suksesi kepemimpinan, yaitu B.J. Habibie, K.H. Abdurahman Wahid, dan Megawati Soekarno Putri. Pada masa ini mulai bemunculan lagi partai politik Islam, Partai politik Islam yang muncul meliputi 3 kategori yang berlatar belakang Islam. Pertama, Partai yang menginginkan dipakainya Islam sebagai asas dan mempejuangkan nilai-nilai keislaman. Kedua, partai yang berasaskan Pancasila, namun tidak mempertimbangkan konstituante traditional Islam. Ketiga, partai yang mempunyai hubungan khas dengan kalangan Muslim, namun tidak membatasi diri pada umat Islam dan kepentingannya. Dalam masyarakat Indonesia, ulama dianggap sebagai panutan. Maka ulama dapat berperan sesuai dengan ajaran Islam akan mampu mengarahkan umatnya untuk kehidupan yang baik. Awalnya, keberadaan ulama dikenal di dunia pondok pesantren, masjid, taklim serta mushola sebagai pendidik dan pengajar Islam tapi perannya berkembang selama kehidupan. Misalnya masalah pribadi dibawa ke ulama meminta doa agar usahanya ingin sukses dalam pemilihan pemimpin (*umara*) dengan cepat kepala desa setempat, anggota DPRD dan Bupati ingin sukses datang ke ulama untuk memberitahu apa yang dia inginkan.

Pada masa Kontemporer sekarang ini, kehidupan masyarakat yang beragama, terutama dalam memimpin dan mengembangkan pemikiran moral dan keagamaan, relasi ulama dan *umara* sangat menarik untuk mewujudkan pribadi yang utuh dan kemajuan baik lahir maupun batin. Berdasarkan uraian diatas, jelaslah bahwa ulama bukan hanya orang yang mendalami agama, tetapi juga orang yang memiliki ilmu yang luas, sehingga dari ilmunya tersebut dapat ikut serta dalam proses pembangunan untuk mewujudkan keyakinan beragama dan kesejahteraan masyarakat umum. Selama ada persyaratan politik yang memadai, seperti dukungan politik, partai politik, dan tujuan politik, ulama dapat berperan apa saja. Pada dasarnya tidak ada yang dapat menghalangi umat Islam untuk terlibat dalam politik. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) masih terjadi kekerasan terhadap kelompok minoritas yaitu kelompok Ahmadiyah dan juga Syiah. Kasus-kasus penutupan gereja secara paksa juga terjadi di era pemerintahan SBY, maka pemerintahan

Jokowi-JK bisa memperbaiki titik lemah SBY di masa kekuasaan pada saat itu. Lalu pada kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin telah menampilkan wajah politik yang berpihak pada ulama atau kelompok Islam. Setidaknya sejumlah kebijakan politik hukum Islam yang populis diterbitkan. Setidaknya beberapa kebijakan politik hukum Islam yang populis telah diberlakukan, seperti Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri dan penerbitan sejumlah undang-undang bernuansa "Islam".

B. Saran-Saran

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, ada beberapa saran yang harus dicermati. Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis ingin memberikan beberapa saran tentang relasi ulama dengan *umara'* dalam perspektif Al-Ghazali dan relevansinya pada politik Islam di Indonesia. Adapun saran dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu saran teoritis dan saran praktis.

1. Saran Teoritis

- a) Disarankan bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian lebih mendalam terhadap relasi ulama dengan *umara'* dengan pendekatan dan metode yang berbeda. Sebab umat Muslim akan merasa tenang ketika dipimpin, atau di bawah pemerintahan seorang penguasa Muslim yang beriman kepada Allah SWT. Karena ulama merupakan sosok yang dekat dan dapat dipercaya masyarakat. Ulama juga sosok yang memahami perkembangan keadaan dan sosial ekonomi masyarakat dalam berbagai aspek positif di masa mendatang.
- b) Disarankan bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian lebih teliti dengan melihat bahwa, ulama dan *umara'* keduanya diibaratkan sebagai anak kembar. Ulama sebagai pondasi, dan *umara'* sebagai penjaganya, sesuatu yang tanpa pondasi akan mudah runtuh, dan sesuatu tanpa penjaga akan hilang. Keberadaan *umara'* adalah keharusan bagi ketertiban dunia, ketertiban dunia adalah keharusan bagi ketertiban agama, dan ketertiban agama adalah keharusan bagi tercapainya

kesejahteraan akhirat. Dengan demikian terdapat ikatan erat antara ulama dan *umara'* bagi tegaknya kedaulatan negara melalui kepala negara yang ditaati dan yang bisa melindungi kepentingan umat, baik dunia dan juga akhirat.

2. Saran Praktis

- a) Bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI), upaya hubungan ulama dan *umara'* harus ditingkatkan, tidak hanya oleh berbagai daerah di Indonesia. Karena diplomasi saat ini sedang mengalami perkembangan yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Dalam arti menjaga Indonesia sendiri karena di tengah keragaman agama dan etnis negara Indonesia, dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dan juga merupakan momen dan modal besar bagi Indonesia dalam upayanya menjadi sebuah negara dengan keragaman suku dan budaya, sehingga dapat menjadi contoh keharmonisan hidup untuk kepentingan nasional, terutama dalam mengejar perdamaian dunia. MUI harus tetap eksis dan berdiri di Indonesia. Karena sudah banyak kontribusi nyata MUI dalam pemberantasan tindak pidana terorisme selama ini.
- b) Bagi masyarakat dan umat Muslim, pada dasarnya tidak ada yang dapat menghalangi umat Islam untuk terlibat dalam politik. Kebijakan dan langkah-langkah agar sesuai dengan tujuan yang dicapai, seiring berjalannya waktu, ulama secara bertahap bergabung dengan kekuasaan pemerintahan negara, dan harus memberikan nasehat kepada para pemimpin melalui agama. Jika *umara'* sewenang-wenang atau melakukan ketidakadilan, disengaja atau tidak, tugas ulama yaitu mengingatkan dan mengkritisi mereka guna melindungi generasi Islam dan menjaga urusan umat Islam. Karena itu kita harus berkontribusi untuk negeri ini dengan memilih pemimpin yang bijaksana. Oleh sebab itu layaknya kita mengharapkan pemimpin yang memperjuangkan aspirasi umat Islam dan menghilangkan segala kerusakan yang dapat merugikan rakyat, negara dan agama.